

DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP KETIDAKSETARAAN SOSIAL DI PALANGKA RAYA

Kukuh Wurdianto

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palangka Raya
(email: kwpalangkaraya@gmail.com)

Akhmad Syarif

Prodi Penjaskesrek Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palangka Raya
(email: syarifroeslan2018@gmail.com)

Dedy Norsandi

Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palangka Raya
(email: dedy.norsandi69@gmail.com)

Dicky Arianto Kamin

Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palangka Raya
(email: dickyariantokamin@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan baik kebijakan nasional maupun lokal mempengaruhi ketidaksetaraan sosial di Kota Palangka Raya. Dengan menelaah literatur terbaru, kebijakan program sosial terkait pendidikan, dan studi kasus pada tingkat kota, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat universal tanpa diferensiasi kontekstual seringkali memperkuat kesenjangan akses dan mutu antar kelompok sosial. Rekomendasi diarahkan pada penyesuaian kebijakan berbasis konteks lokal, penguatan distribusi guru dan infrastruktur, serta pemantauan berbasis data untuk menunjang pemerataan.

Keyword : Dampak Kebijakan, Pendidikan, Ketidaksetaraan Sosial

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi. Teori pembangunan menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan dapat menjadi instrumen pengurangan ketidaksetaraan pendapatan dan mobilitas sosial. Namun, di banyak kota menengah di Indonesia termasuk Palangka Raya, penerapan kebijakan pendidikan menghadapi tantangan lapangan seperti distribusi guru yang

timbang, infrastruktur yang belum merata, dan hambatan ekonomi keluarga yang memengaruhi partisipasi sekolah. Tanti Nurmala Sari & Jasiah. (2025)

Sejumlah penelitian dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa tanpa perhatian kontekstual (mis. karakteristik geografis, ekonomi rumah tangga, dan kapasitas lembaga lokal), kebijakan pendidikan nasional cenderung menghasilkan hasil yang tidak seimbang

antara kelompok kaya dan miskin, serta antara wilayah pusat kota dan pinggiran. Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi dinamika urbanisasi, keberadaan permukiman kumuh tertentu, dan variasi akses layanan publik yang berimplikasi pada kesenjangan pendidikan dan sosial. Endah Mustika Pertiwi (2023).

Penelitian-penelitian lokal (mis. studi peran guru dan evaluasi program kesejahteraan) mengindikasikan fenomena learning loss dan ketidakseimbangan akses layanan pendidikan di beberapa kecamatan, yang erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut. Hal ini menuntut kajian kebijakan yang menautkan indikator pendidikan dengan ukuran ketidaksetaraan sosial di tingkat kota.

Tujuan penelitian: (1) Mendeskripsikan kebijakan pendidikan utama yang relevan dengan Palangka Raya; (2) Menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap ketidaksetaraan sosial; (3) Mengajukan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengurangi ketidaksetaraan melalui sektor pendidikan.

Ketidaksetaraan sosial diukur melalui variabel-variabel seperti perbedaan pendapatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), dan ketimpangan kesempatan. Literatur ekonomi pendidikan menunjukkan korelasi negatif antara peningkatan akses/lama sekolah dengan tingkat ketimpangan pendapatan, tetapi hasil ini bergantung pada cara kebijakan diimplementasikan dan struktur distribusi fasilitas pendidikan. Studi regional/ASEAN menemukan bahwa ekspansi pendidikan dapat menurunkan ketimpangan jangka panjang, tapi distribusi manfaatnya tidak otomatis

merata tanpa intervensi pro-poor. Samuel Fery Purba (2024)

Beberapa kebijakan nasional penting yang relevan untuk konteks ini meliputi program beasiswa/pendanaan, program insentif guru dan penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil (mis. program penempatan), serta inisiatif kurikulum dan program digitalisasi pembelajaran. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan akses dan mutu, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengimplementasikan program, mekanisme pendanaan, serta monitoring dan evaluasi yang nyata.

Studi empirik di Palangka Raya menemukan fenomena learning loss, peran guru memitigasi dampak tersebut, dan adanya kebutuhan optimalisasi program kesejahteraan (mis. PKH) untuk mendukung akses pendidikan keluarga miskin. Temuan ini menunjukkan hubungan langsung antara program sosial ekonomi dan partisipasi pendidikan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang disajikan adalah studi literatur sistematis dan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dilengkapi analisis sekunder data kuantitatif (indikator pendidikan dan sosial-ekonomi yang tersedia dari publikasi lokal dan nasional). Langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan sumber primer dan sekunder: artikel jurnal terbaru, laporan pemerintah daerah, studi implementasi program PKH di Kecamatan Jekan Raya, dan makalah ekonomi pendidikan yang relevan. Sumber-sumber dipilih berdasarkan relevansi waktu (prioritas publikasi 2019–2025) dan aksesibilitas. Nurmala Sari & Jasiah. (2025)
2. Sintesis kebijakan: mengidentifikasi kebijakan nasional dan program lokal

yang berhubungan langsung dengan akses dan mutu pendidikan (mis. penempatan guru, insentif, beasiswa, program keluarga harapan).

3. Analisis dampak dan mekanisme: menganalisis bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan determinan lokal (ekonomi rumah tangga, ketersediaan infrastruktur, distribusi guru) untuk memunculkan pola ketidaksetaraan.
4. Triangulasi temuan: membandingkan hasil studi literatur dengan temuan studi kasus lokal (mis. laporan sekolah, artikel penelitian tentang learning loss di Palangka Raya) untuk memastikan validitas inferensi.

Batasan penelitian: tidak melakukan survei primer lapangan karena ruang lingkup ini berbasis kajian literatur dan analisis dokumen. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan bersifat dasar dan perlu diverifikasi oleh studi lapangan lebih lanjut sebelum implementasi operasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Kondisi Pendidikan dan Sosial-ekonomi di Palangka Raya

Berdasarkan studi lokal dan kajian kebijakan, beberapa fakta utama: (1) Terdapat variasi mutu pembelajaran di antara sekolah—beberapa sekolah perkotaan lebih unggul dibandingkan sekolah di pinggiran atau pemukiman tertentu; (2) Isu learning loss tercatat sebagai masalah nyata di jenjang SMP/MTs; (3) Program sosial kesejahteraan seperti PKH telah hadir di beberapa kecamatan namun implementasinya belum sepenuhnya mengatasi hambatan non-finansial terhadap partisipasi pendidikan. Temuan-temuan ini konsisten dengan hasil

penelitian yang menekankan kendala distribusi guru dan infrastruktur sebagai sumber ketimpangan pendidikan.

Mekanisme Penguatan Ketidaksetaraan oleh Kebijakan yang Tidak Kontekstual

Analisis menunjukkan beberapa mekanisme di mana kebijakan dapat memperkuat ketidaksetaraan:

1. Kebijakan universal tanpa diferensiasi lokal: alokasi sumber daya yang merata per kepala sekolah atau per sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan tambahan daerah tertinggal/pinggiran menyebabkan sekolah yang sudah lebih kuat semakin jauh tertinggal/pinggiran perbaikan relatifnya. Hal ini menimbulkan efek "perpetuasi modal" bagi keluarga yang sudah berada pada posisi lebih baik secara ekonomi.
2. Distribusi guru dan kualitas tenaga pendidik: meskipun terdapat program penempatan, insentif yang kurang menarik untuk guru menempatkan mereka di lokasi-lokasi tertentu berdampak pada konsentrasi guru berkualitas di area tertentu, sementara daerah lain kesulitan. Kekurangan guru berkualitas menurunkan mutu pembelajaran yang berdampak jangka panjang pada produktivitas tenaga kerja lokal.
3. Hambatan non-finansial bagi keluarga miskin: biaya tidak langsung (transportasi, seragam, peluang kerja anak) dan kondisi rumah tangga (ketidakmampuan belajar di rumah karena ketiadaan fasilitas digital) membuat bantuan finansial saja tidak cukup untuk memastikan partisipasi penuh di sekolah. Implementasi program bantuan sosial yang tidak mengintegrasikan layanan pendidikan

(mis. bimbingan belajar, dukungan psikososial) kurang efektif.

Dampak Kebijakan Spesifik (Contoh: Program Keluarga Harapan - PKH)

Implementasi program PKH di Kecamatan Jekan Raya menunjukkan bahwa alokasi bantuan meningkatkan akses layanan dasar, namun masalah seperti ketepatan waktu pembayaran, aspek disposisi pelaksana, serta hambatan sosial-ekonomi tetap mengurangi efektivitas pengurangan ketidaksetaraan jangka panjang. Dengan kata lain, PKH membantu meredam gejala kemiskinan tetapi belum secara optimal mengubah indikator pendidikan jangka panjang seperti kelulusan yang berkualitas dan capaian pembelajaran.

Implikasi Jangka Panjang bagi Ketidaksetaraan Sosial Kota

Jika kondisi ini dibiarkan, maka struktur ketidaksetaraan sosial akan cenderung menajam: kelompok dengan akses pendidikan berkualitas akan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, sementara kelompok marjinal terus mengalami stagnasi. Hal ini menimbulkan risiko reproduksi kemiskinan antargenerasi dan erosi mobilitas sosial di tingkat kota.

Pembahasan

Mengapa Kebijakan Tidak Bekerja Sama Rata?

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan relatif kebijakan pendidikan untuk menurunkan ketidaksetaraan secara signifikan di Palangka Raya:

1. Mismatch antara desain kebijakan dan konteks lokal. Kebijakan yang dirancang berskala nasional sering tidak memperhitungkan kelemahan

struktural daerah seperti ketiadaan transportasi, kawasan pemukiman kumuh, atau karakteristik demografis lokal. Studi literatur menekankan perlunya pendekatan desentralisasi yang lebih tajam dan fleksibel untuk menangani disparitas antar wilayah.

2. Keterbatasan kapasitas pelaksana lokal. Implementasi kebijakan bergantung pada birokrasi dan kapasitas SDM di tingkat kota/kecamatan/sekolah. Kelemahan manajerial dan monitoring membuat intervensi sulit terukur dampaknya.
3. Pendanaan yang tidak memadai untuk intervensi pro-poor. Program pemerataan memerlukan anggaran tambahan untuk subsidi layanan non-formal (bimbingan belajar, pemenuhan gizi anak, transportasi siswa) yang seringkali diabaikan dalam alokasi normatif.

Strategi Perbaikan Kebijakan untuk Mengurangi Ketidaksetaraan

Berdasarkan temuan dan literatur, beberapa strategi rekomendasi adalah:

1. Pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based funding): alokasi dana pendidikan harus mempertimbangkan indeks kerentanan sosial dan indikator mutu sekolah sehingga sekolah dengan kebutuhan lebih tinggi mendapat porsi dukungan lebih besar.
2. Penguatan program integratif antara pendidikan dan perlindungan sosial: program seperti PKH perlu disintegrasikan dengan program pendidikan—mis. kupon pendidikan untuk bimbingan belajar, subsidi transportasi siswa, dan dukungan alat belajar digital bersama.
3. Insentif dan dukungan bagi guru untuk ditempatkan di wilayah kurang layanan: program insentif profesional dan beban kerja yang terukur, disertai pembinaan

dan pelatihan jarak jauh, dapat meningkatkan retensi guru berkualitas di daerah yang memerlukan.

4. Pemanfaatan teknologi tepat guna (low-tech bila perlu): solusi pembelajaran yang dirancang untuk keterbatasan konektivitas (mis. modul offline, radio pembelajaran) seperti yang direkomendasikan studi pemerataan dapat membantu mengurangi gap akses.
5. Monitoring berbasis data dan evaluasi lokal: membangun sistem indikator kinerja yang memantau capaian pembelajaran, angka putus sekolah, dan partisipasi; data ini harus digunakan untuk perbaikan kebijakan secara berkala.

Prioritas Intervensi di Palangka Raya

Untuk Palangka Raya, prioritas awal adalah: (a) mapping area dengan konsentrasi low-achievement dan permukiman rentan; (b) koordinasi antardinas (pendidikan, sosial, kesehatan, perumahan) untuk program terintegrasi; (c) program pilot needs-based funding pada beberapa kecamatan sebagai basis evaluasi kebijakan skala lebih luas.

Kesimpulan

1. Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam dinamika ketidaksetaraan sosial di Kota Palangka Raya. Namun implementasinya yang kerap bersifat generik tanpa penyesuaian kontekstual berisiko memperkuat ketidaksetaraan.
2. Masalah utama yang muncul adalah distribusi guru dan mutu pendidikan yang tidak merata, hambatan non-finansial bagi keluarga miskin, serta keterbatasan kapasitas pelaksana di tingkat lokal.
3. Rekomendasi kebijakan meliputi pengalokasian dana berbasis kebutuhan,

integrasi program pendidikan dan perlindungan sosial, insentif untuk distribusi guru, solusi pembelajaran sesuai kondisi infrastruktur lokal, serta penguatan sistem monitoring berbasis data. Implementasi rekomendasi ini perlu diuji melalui pilot dan evaluasi berkelanjutan.

References

- Buku/monograf: *Kesenjangan Pendidikan — Perbedaan Akses* (2024). (Repository publik). Dapat diunduh: <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/588686-kesenjangan-pendidikan-perbedaan-akses-d-e8c57f88.pdf>.
- Endah Mustika Pertiwi, Setria Utama Rizal, Muzakki, (2023) *Dinamika Learning Loss: Peran Guru Di Smp/Mts Kota Palangka Raya*, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Volume 6 Nomor 4
- Peran Guru di SMP/MTs Kota Palangka Raya — *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* (JRPP). (2023). *Peran Guru dalam Mengatasi Learning Loss di Kota Palangka Raya*. PDF dapat diunduh: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/20953/15479>.
- Purba, S. F. (2024). *The Impact of Educational Conditions on Income Inequality and Economic Growth in South Sumatra*. KnE Social Sciences. PDF: <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/16104/25713>
- Puspita, A. (2025). *Ketimpangan Pendidikan Berkualitas Antara Perkotaan dan Pedesaan*. (Edisi/Repository). Dapat diakses:

<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/583/554>.

Samuel Fery Purba¹, Husnul Khotimah¹, Andreas A T Suli, and Mentari Wahyuningsi, (2024) *The Impact of Educational Conditions on Income Inequality and Economic Growth in South Sumatra*, 8th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference. Volum 2024.

Sinaga, H. Y., Budiharjo, & Nenobais, H. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya*. Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik. Dapat diakses: <https://ejournal.moestopo.ac.id/index.php/publika/article/view/4346> (atau unduh PDF pada link jurnal).

Tanti Nurmala Sari & Jasiah. (2025). *Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 4 (April 2025). Dapat diakses: https://www.researchgate.net/publication/391077218_Membangun_Pendidikan_Berkeadilan_Mengatasi_Masalah_Pemerataan_Pendidikan_Antara_Daerah_dan_Perkotaan.